

Media Online	Tribun Timur
Tanggal	Senin, 5 Mei 2025
Wilayah	Kabupaten Bone



Dana Desa Rawan Diselewengkan, Inspektorat Bone Kumpulkan Seluruh Kades



TRIBUN-TIMUR.COM, BONE - Inspektorat Daerah Kabupaten Bone mengaku pihaknya akan melakukan pengawalan terhadap pengelolaan dana desa agar sesuai standar, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal itu diutarakan oleh Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, Andi Muhammad Yamin dalam kegiatan Asistensi dan Pendampingan Kecamatan serta Desa di Hotel Helios Jalan Langsung Kecamatan Tanete Riattang Barat, Senin (5/5/2025).

Kegiatan tersebut berlangsung selama enam hari mulai tanggal 5 hingga 10 Mei 2025, dengan mengangkat tema 'Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam mewujudkan Swasembada Pangan Nasional'. Andi Muhammad Yamin, mengaku kegiatan Asistensi dan Pendampingan Kecamatan dan Desa ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pengelolaan anggaran keuangan Desa yang efektif dan transparan, "Maksud dan tujuan kegiatan Asistensi dan pendampingan Kecamatan dan Desa, yaitu untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa khususnya di dalam pembuatan SPJ rampung secara keseluruhan,"ujarnya. "Selain itu untuk melihat bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban berlangsung sesuai dengan mekanisme atau tahapan yang sudah dijalankan, dan terakhir untuk memastikan adanya sinkronisasi antara perencanaan dan pertanggungjawaban," sambungnya. Lebih lanjut ia menjelaskan berdasarkan temuan Inspektorat ada pelaksanaan Keuangan di desa yang tidak mengikuti standar.

Adapula Desa yang disinyalir sama sekali belum melakukan pembayaran PBB di tahun 2024. "Dan hal tersebutlah yang harus mendapatkan asistensi dan pendampingan agar diketahui kendala apa saja yang dihadapi desa tersebut," tegasnya. Andi Muhammad Yamin juga menyadari bahwa Kabupaten Bone memiliki cakupan wilayah yang cukup luas, 328 desa dan 27 Kecamatan. Namun, dengan adanya Asistensi dan pendampingan Kecamatan dan Desa ini dapat menjadi langkah nyata untuk memastikan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan sesuai dengan tahapan dan mekanisme. "Dalam asistensi dan pendampingan ini, kami akan tarik keluar desa yang kira-kira akan dijadikan sample APBD tahun 2025, Kami juga ingin memastikan tim Kecamatan sebagai tim evaluasi dan verifikasi berjalan sebagaimana mestinya,"ujarnya. Sementara, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin berharap agar pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya, sehingga mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat. "Kami berharap tentunya pengelolaan anggaran keuangan dana desa dapat dikelola dengan lebih efektif akuntabilitas dan bisa dipertanggungjawabkan, kita harus membuktikan kepada pemerintah pusat bahwa pemerintah desa, pemerintah kecamatan bisa mengelola anggarannya dengan baik,"tandasnya.(*)